

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020)
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Indonesia, Kencana, 2008)
- Arba'i, Yon Artiono, Aku Menolak Pidana mati, (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012)
- Berrih, Carol, Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia, (KontraS, 2019)
- Gunakaya, A.Widiada, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta : ANDI,2007)
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, Hukum penitensier Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017)
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Surabaya:Kencana Prenada Group,2005)
- Napitupulu. Erasmus A, Kertas Kebijakan, Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Pidana mati, (Jakarta : Komnas HAM, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, (Yogyakarta, Genta Publishing,2009)
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana : Kumpulan Kuliah Prof.Satochid Kartanegara dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, (Balai Lektur Mahasiswa)
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni 2006)
- _____, Hukum Pidana I, (Semarang : Penerbit Yayasan Sudarto,2013)
- Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), (Deepublish, 2015)
- _____, Hukuman mati dan Permasalahannya di Indonesia, (Deepublish, 2015)

Utrecht, E. Pengantar dalam Hukum Indonesia (Djakarta : PT. Penerbitan dan Balai Buku “Ichtiar”, 1964)

Karya Ilmiah

Aista Wisnu dan Rahmi Dwi, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No 3, 2020

Arwansyah, Leo., et al, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia." PAMPAS: Journal of Criminal Law 1.3 (2020): 19.

Arya Brata. R, “Pro Kontra Pidana mati (Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba), Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Maret, 2015

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf 3 (2010).

Bakhri, Syaiful, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18.1 (2011)

Bonitua, Y. D., Pujiyono, “Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia.” Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-18 (2017)

Diani Indramaya, “Pro-Kontra Pidana Mati Kasus Narkoba Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia” (Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)

Dio, et al., “Eksaminasi Perkara Mary Jane (Kajian mengenai putusan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya terhadap Mary Jane)” (LBH Jakarta-MaPPI FHUI, 2016)

Inten Kuspitarsari,dkk, "Peran Kejaksaan sebagai Eksekutor Pidana Mati di Indonesia." Diponegoro Law Review, vol. 6, no. 2, 2017, pp. 1-16.

Kartika, Shanti Dwi. "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum." Info Singkat Hukum, Volume VI Nomor 06, 2014

Kusumo, Ayub Torry Satriyo. "Hukuman mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional." dalam <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/>, (2015)

M. Julyano dan A. Y. Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” Jurnal Crepido, Vol 01, No 01, pp.13-22, Juli 2019

Marselinus Yohanes Rian Asmaran, “Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu Eksekusi Terpidana Mati.” Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2017)

Miru, Ikhsan Roland, “Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana.” Diss. Untag Surabaya, 2014.

Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." Warta Dharmawangsa, no. 59, 2019.

Patrick Hudson, "Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Human Rights under International Law?" EJIL, Vol. 11 No. 4. (2000)

Rahayu, Sri, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan." INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 7.3 (2014).

Rois, Nur, "Masalah Pidana Mati–Suatu Perspektif Abolisionis dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia di Masa Datang." (2016).

Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 02-Juni 2017

Samuel Agustinus, et al., "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 4, 2016.

Satriyo, Rudy, "Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati", Jurnal Legislasi Indonesia Vol 2 No.1-Marret 2005

Tabiu, Ramadan, "Ketidakpastian Hukum Jangka Waktu Penetapan Status Tersangka Dari Proses Penyidikan Sampai Pelimpahan Perkara Ke Persidangan." (Jurnal Hukum Prioris, vol. 5, no. 2, 2016)

Wicaksono, Setiawan, "Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia." Pandecta, Vol 11 Nomor 1, Juni 2016

Amnesty International, "Laporan Global Amnesty International, Hukuman dan Eksekusi Mati 2020", Report ACT 50/3760/2021, April 2021

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No.B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan

Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Grasi

Website

<https://wartakota.tribunnews.com/2021/08/19/sosok-ryan-jombang-terpidana-mati-kasus-pembunuhan-11-orang-yang-dianiaya-habib-bahar-di-lapas?page=all>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-alasan-penundaan-eksekusi-hukuman-mati-lt53df2c50e4980>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-peninjauan-kembali-boleh-berkali-kali-lt55281d1ec53ee>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191107161357-12-446388/eksekusi-mati-tertunda-jaksa-agung-singgung-grasi-hingga-pk#:~:text=%22Permohonan%20grasi%20tidak%20menunda%20pelaksanaan,dalam%20hal%20putusan%20pidana%20mati.>

<https://www.antaranews.com/berita/2670077/icjr-terpidana-mati-yang-menunggu-dieksekusi-per-2021-naik-13-persen>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-tragis-bahar-42-tahun-menunggu-dieksekusi-mati.html>

<https://metro.tempo.co/read/791910/terpidana-mati-titus-igweh-saya-disiksa-kemaluan-disetrum>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengingat-kembali-ceramah-mr-roeslan-saleh-tentang-pidana-mati-lt5f9fd27099486>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986>

Sumber Lainnya

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, 2008.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik RUU KUHP*, 2015.